

Pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi mengakibatkan kualitas hidup yang menurun tajam, kemacetan, banjir akibat limbah rumah tangga dan berkurangnya tanah resapan akibat fungsi sungai terganggu. Yang menjadi perhatian publik saat ini adalah banyaknya kawasan kumuh hampir di seluruh bagian Kota Jakarta. Dalam konteks permukiman di ibukota, terdapat banyak pemukiman-pemukiman atau bangunan yang termasuk kepada tipe kampung illegal. Melihat kondisi ini, program pembangunan pada penataan kampung kota menjadi sorotan terkait keberhasilannya. Saat kepemimpinan Anies Baswedan, salah satu program penataan kampung kota di Jakarta adalah *Collaborative Implementation Program (CIP)* melalui dinamika kolaborasi pada setiap *stakeholders* terkait pembangunan. Selain itu, mengusung pola pembangunan partisipatif karena dalam prosesnya melibatkan semua aspek yang berkaitan dengan hasil pembangunannya. Penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan tentang bagaimana kolaborasi terbentuk antar *stakeholders* serta melihat aspek *power* dan kepentingan masing-masing aktor yang terlibat menggunakan kerangka *Collaborative Governance*.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode penelitian ini membantu menjelaskan bagaimana pola relasi yang terjadi antar aktor yang terlibat dalam penataan kampung kota khususnya di Kampung Bukit Duri. Data dikumpulkan dari substansi terkait pembangunan pemukiman dan elemen masyarakat. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa suatu kolaborasi dapat menjadi efektif karena adanya strategi komunikasi dan memperhatikan aspek kehidupan masyarakat. Namun dalam prosesnya, keterlibatan masyarakat harus lebih ditingkatkan agar program dapat berkelanjutan dalam jangka panjang.

Kata Kunci : *Collaborative Implementation Program (CIP)*, pembangunan partisipatif, pemukiman kumuh, kolaborasi.

ABSTRACT

Increased population growth has resulted in a sharply reduced of life, congestions, flooding due to household waste and reduced infiltration soil due to disrupted river functions. Of particular concern to the public today are the many slum areas in almost all part of Jakarta. In the context of settlements in the capital, there are many settlements or buildings that fall into the illegal type. Seeing this condition, the development program on the arrangement of urban villages is in the spotlight regarding its success. During Anies Baswedan's leadership, one of the urban village arrangement programs in Jakarta was the Collaborative Implementation Program (CIP) through the dynamics of collaboration in every stakeholders related to development. In addition, it carries a participatory development pattern because it involves all aspects related to development process. This research tries to answer the question of how collaboration is formed between stakeholders and see aspects of power and interest of each actor involved using the Collaborative Governance framework.

This research uses a qualitative method with a case study approach. This research method helps explain how the pattern of relations that occurs between actors involved the arrangement of urban villager, especially in Kampung Bukit Duri. Data was collected from substances related to settlement development and community elements. The results of this study state that a collaboration can be affective because of a communication strategy and pay attention to aspects of community life. However, in the process, community involvement must be further enhanced so that the program can be sustainable in the long term.

Keywords : Collaborative Implementation Program (CIP), participatory development, slums, collaboratio